

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat krusial dalam mendorong pembangunan daerah. Hal ini menuntut setiap daerah untuk mengelola dan memanfaatkan semua potensi daerah serta mengembangkan kreatifitas, inisiatif dan prakarsa dalam pembangunan daerah. Salah satu fungsi dan tujuan pembangunan daerah adalah pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlindungi, terlayani dalam mengakses atau berpartisipasi dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kondisi ini dimungkinkan karena adanya regulasi dari pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Agar kerangka kegiatan yang berbasis masyarakat Kabupaten Kulon Progo terarah, terpadu, menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan, maka disusunlah Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 - 2022 sebagai bagian dari RPJMD.

Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan.
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Renstra Kantor Kesbangpol sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran (RKA). Selain itu Renstra Kantor Kesbangpol merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Kesatuan Bangsa yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Landasan hukum

Peraturan Perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RRPJMD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022;
- 11) Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo

1.3. Maksud dan tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya renstra adalah sebagai *roadmap* dalam mencapai tujuan pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 dari aspek Kesatuan Bangsa dan Politik serta untuk menyediakan acuan bagi Badan/Dinas/instansi terkait serta masyarakat sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD yang disusun setiap tahun sebagai bentuk operasioanalisis strategi-strategi untuk mencapai visi organisasi yang akan dipaparkan dalam rencana Stategis Ini.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo adalah :

- 1) Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan.
- 2) Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo, Intansi terkait dan masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan pada setiap tahunnya, yang akan dibiayai oleh APBD, APBD DIY dan APBN.
- 3) Menjabarkan tentang gambaran umum, program Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada masa lima tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai.
- 4) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Nasional dan Provinsi, Visi dan Misi Bupati terpilih yang disesuaikan dengan potensi, kondisi dan aspirasi masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	2.2 Sumber Daya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan Hubungan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga
	3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN STRATEGI
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo yang keberadaannya ditetapkan didalam Peraturan Daerah No 16 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 75 Tahun 2012. Tugas tersebut adalah:

- a. Melaksanakan Kegiatan pembinaan kesatuan bangsa
- b. Melaksanakan Kegiatan fasilitasi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, dan
- c. Melaksanakan Kegiatan Ketatausahaan;

Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam Peraturan Daerah No 16 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 75 Tahun 2012. Fungsi Kesbangpol adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik,
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik, dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati dibidang kesatuan bangsa dan politik.

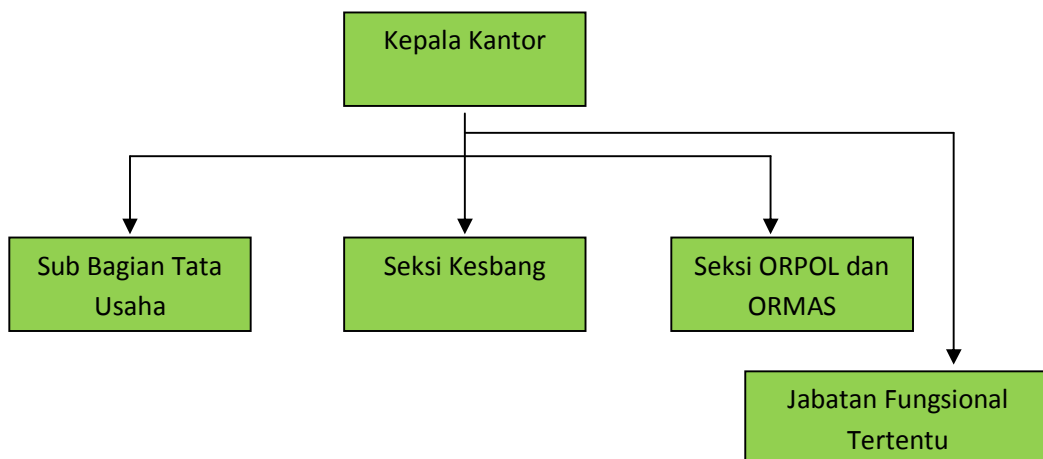
Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 75 Tahun 2012 terdiri dari :

- a). Kepala Kantor
- b). Sub bagian Tata Usaha
- c). Seksi Kesatuan Bangsa
- d). Seksi Organisasi Politik dan Organisasi Masyarakat
- e). Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Uraian tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerumahtangaan, perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan, administrasi kepegawaian , administrasi keuangan, penyusunan program kerja dan laporan.
2. Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa.
3. Seksi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi organisasi politik dan organisasi masyarakat.

Berikut bagan Unsur Organisasi Kantor Kesbangpol :



2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada sebagai pendukung pelaksanaan ketugasan dan kegiatan Kantor Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo dapat diuraikan seperti dalam Susunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pegawai Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat tahun 2017

Unit	Pria	Wanita	Gol I	Gol.II	Gol.III	Gol.IV	Jumlah
Kepala	1	-	-	-	-	1	1
Tata Usaha	3	4	-	2	5	-	7
Seksi Kesbang	3	1	-	2	2	-	4
Seksi Ormas dan Orpol	2	1	-	2	1	-	3
Jumlah	9	6	-	6	8	1	15

Tabel 2.2.
Tingkat pendidikan pegawai Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo tahun 2017

Unit	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	Jumlah
Kepala	-	-	-	-	1	1
Tata Usaha	-	5	-	2	-	7
Seksi Kesbang	-	2	-	2	-	4
Seksi Orpol	-	2	-	-	1	3
Jumlah	-	9	-	4	2	15

2.2.2. Sumber daya modal/aset

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Kesbangpol adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2016

No	Jenis asset	2012		2013		2014		2015		2016	
		baik	rusak	baik	rusak	baik	rusak	baik	rusak	baik	rusak
1	Gedung	2	-	2	-	1	-	2	-	2	-
2	Kendaraan Dinas roda 4	2	-	3	-	2	-	2	-	2	-
3	Kendaraan Dinas roda 2	3	-	3	-	3	-	4	-	4	-
4	Wireless	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
5	Mesin Ketik	9	-	9	-	8	-	5	-	5	-
6	Telepon	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
7	PesawatHT	15	-	12	-	5	-	5	-	15	-

8	Laptop	2	-	2	-	3	-	5	-	7	-
9	Komputer	5	-	4	-	4	-	5	-	8	-
10	Proyektor LCD	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
11	Ruang Rapat	1	-	1	-	1	-	2	-	2	-
12	Kamera	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-

2.3. Kinerja pelayanan Kesbangpol

Berdasarkan Rencana Strategis Kesbangpol Tahun 2012-2016, Kantor Kesbangpol telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Kulon Progo

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun					
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	13					14
A	IKK																			
1	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah (kali)	-	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Kali)	-	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
B	Indikator RPJM																			
1	Terlatihnya SAR LINMAS (orang)			1500	300	300	300	300	300	300	300	-	-	-	1,00	1,00	0	0	0	0
2	Terlaksananya FKDM (kali)			140	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Tar PKBN (orang)			75	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Program Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun					Rata rata pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri																	
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	137,808,800	49,259,300	48,166,800	0	0	125,009,800	48,937,100	47,694,275	0	0	90,71	93,35		0	0		
Pengembangan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	66,968,400	76,921,500	61,046,700	0	0	55,155,350	67,962,300	58,375,850	0	0	82,36	88,35		0	0		
Pendidikan politik masyarakat	99,672,350	114,518,050	98,058,250	0	0	85,461,350	103,907,300	85,462,200	0	0	85,74	90,73		0	0		
Peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	0	0	0	25,146,475		240,920,050	533,893,850	0	62,435,300					0	0		
Pelayanan administrasi perkantoran	53,367,900	61,694,550	63,639,250	0	0	48,160,661	55,414,315	57,075,224	0	0	90,24	89,82	62,73	0	0		
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	49,269,045	158,367,500	145,548,750	0	0	48,241,525	153,630,575	145,151,250	0	0	97,91	97,01		0	0		
Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3,034,550	2,615,100	4,523,700	0	0	2,757,700	2,518,150	4,519,975	0	0	90,88	96,29		0	0		
Penyusunan dokumen perencanaan skpd	2,273,550	884,550	2,342,200	0	0	1,896,500	858,550	4,250,525	0	0	83,42	97,06		0	0		
Pengawasan dan pengendalian program	1,766,600	1,432,600	1,913,600	0	0	1,675,100	1,427,500	0	0	0	94,82	99,64		0	0		
Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	0	0	0	391,544,975	495,036,948	0	0	0	324,132,364	472,058,841	0	0	0	82,78	95,36		
Perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja	0	0	0	6,797,875	8,248,200	0	0	0	6,770,775	8,234,700	0	0	0	99,06	99,84		
Pengadaan pakaian dinas harian	0	0	0	2,674,000	0	0	0	0	2,325,000	0	0	0	0	86,95	0		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan

1. Memudarnya pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, demokrasi dalam rangka memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur budaya bangsa di kalangan masyarakat
2. Potensi kerawanan sosial di masyarakat akibat adanya pro kontra terhadap kebijakan pemerintah Daerah.
3. Meningkatnya Potensi penyebaran paham-paham radikalisme yang menjadi akar timbulnya terorisme.

Peluang Pengembangan :

1. Partisipasi masyarakat dalam berpolitik semakin tinggi
2. Ketersediaan media informasi
3. Sinergitas pemangku kepentingan melalui forum komunikasi diskusi politik

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, memberi dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas

- a. Melaksanakan Kegiatan pembinaan kesatuan bangsa
- b. Melaksanakan Kegiatan fasilitasi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, dan
- c. Melaksanakan Kegiatan Ketatausahaan;

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka ketugasan yang didukung oleh sarana dan prasarana, anggaran maupun dukungan Sumber Daya Manusia yang ada selama ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, baik kegiatan yang merupakan belanja langsung maupun kegiatan belanja tidak langsung.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kesbangpol dan identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kesbangpol
Kabupaten Kulon Progo

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran pelayanan SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Wawasan kebangsaan • Pembinaan Ormas Orpol 	<ul style="list-style-type: none"> • Perpu No 2 tahun 2017 • Permendagri No 33/2012 • Permendagri no 71 tahun 2012ttg PPWK • SK Bupati nomor 138 tahun 2014 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan jadwal pembinaan • Kecepatan menanggapi permohonan • Inventarisasi SKT yang sudah dikeluarkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat ormas pindah tanpa keterangan • Kelengkapan dokumen pemohon 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon kurang memahami peraturan yang berlaku
Kajian terhadap Renstra Bakeslinmas DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dlm bidang pembinaan pendidikan politik dengan Bakeslinmas 	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 17 tahun 2013 • Permendagri No 33/2012 • Permendagri no 71 tahun 2012ttg PPWK 	Koordinasi pelaksanaan pendidikan politik	Motivasi peserta untuk mengikuti dan mengimplementasikan pendidikan politik	
Kajian terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian produk peraturan di atasnya 	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 17 tahun 2013 • Permendagri No 33/2012 • Permendagri no 71 tahun 2012ttg PPWK 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi kebijakan dari pemerintah pusat 	

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Berkembangnya Paham radikalisme internasional</p> <p>Semakin terbukanya akses mobilitas orang antar negara</p> <p>MEA, AFTA,MDG'S</p>	<p>Adanya kelompok kelompok radikal yang berkembang di masyarakat</p> <p>Timbulnya potensi kerawanan sosial</p> <p>Pembangunan Bandara Internasional</p> <p>KSPN Borobudur, pembangunan JJLS</p>	<p>Tingginya potensi konflik antar kelompok yang mengarah pada perpecahan</p> <p>Pemanfaatan sempadan pantai</p>	-

3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 yang hendak dicapai adalah

“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”

Visi Kabupaten Kulon Progo merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 yaitu **“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”** maka dirumuskan 4 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas

Misi **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram.** Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh stakeholder pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum.

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa diskriminasi. Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan yang tentram, tertib dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh *stakeholder* pembangunan

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa “				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Misi 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram</p> <p>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</p>	<p>Menurunnya nilai nilai Wawasan kebangsaan di masyarakat</p> <p>Munculnya organisasi yang menganut fahan yang tidak sesuai dengan Pancasila</p> <p>Pemahaman tentang demokrasi yang berlebihan</p>	<p>Penyalahgunaan Kemanfaatan teknologi informasi</p> <p>Beragamnya kualitas SDM masyarakat</p>	<p>Keberadaan lembaga mitra SKPD</p> <p>Kondisi sosial politik ekonomi yang kondusif</p>

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kemendagri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, danantarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Visi Kementerian Dalam Negeri adalah: "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa". Untuk

mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 5 (lima) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian Dalam Negeri, adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan ideology dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun arakter bangsa dan stabilitas dalam negeri
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaanadministrasi kependudukan
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang kompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Kesbangpol berdasarkan sasaran Renstra Kemendagri beserta faktor penghambat dan pendorong keberhaslilan penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa</p> <p>Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya nilai niiai Wawasan Kebangsaan di masyarakat • Munculnya organisasi yang menganut fahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan kemanfaatan teknologi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan lembaga mitra SKPD • Kondisi social politik ekonomi yang

		yang tidak sesuai dengan Pancasila • Pemahaman tentang demokrasi yang berlebihan		kondusif
--	--	---	--	----------

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Persoalan ketentraman dan ketertiban pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang akan tetap menjadi permasalahan krusial bagi Kabupaten Kulon Progo. Hal ini sejalan dengan dinamika yang berkembang bersamaan dengan transformasi masyarakat menuju masyarakat yang demokratis. Kondisi yang tentram dan tertib menjadi salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan. Dinamika yang berkembang pada saat terakhir menunjukkan adanya potensi resistensi terhadap pengelolaan sumberdaya alam daerah yang cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari rencana kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang sampai saat ini masih menjadi polemik yang cukup hangat. Perbedaan kepentingan yang terjadi bukan hanya secara vertikal yang melibatkan antara masyarakat dan pemerintah, namun juga secara horizontal yang melibatkan antara kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan kelompok masyarakat yang setuju. Apabila tidak dikelola dengan baik maka perbedaan kepentingan ini akan menjadi bersifat terbuka dan dikhawatirkan apabila ini terjadi dampaknya akan dapat mengganggu jalannya pembangunan. Di samping persoalan di atas, kondisi kemiskinan kemungkinan juga akan menjadi faktor determinan bagi munculnya tindak kriminal dan kejahatan yang dampaknya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

sesuai dengan uraian di atas maka dirumuskan isu-isu yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja SKPD antara lain sebagai berikut :

- a. Rendahnya pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat
- b. Tingginya potensi konflik antar kelompok yang mengarah pada perpecahan
- c. Pemahaman kebebasan demokrasi yang berlebihan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kesbangpol

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Tran sisi	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Terwujudnya lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	Capaian peningkatan Wawasan Kebangsaan dan politik masyarakat	66,57	81,67	81,67	82	82	82,31	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya Visi Pembangunan.

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Kesbangpol Kulon Progo tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : “ terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa “			
MISI III : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ada dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana diuraikan dalam tabel 6.1 dan tabel 6.2.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Indikatif Kantor Kesatuan Bangsa dan Poitik Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi akhir periode Renstra
						(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	
Terwujudnya lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan	Capaian penegakan perturan daerah dan penanganan konflik sosial	Program : Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	Capaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat		945.042.050	1.283.141.300	968.900.000	933.540.000	1.009.480.000	1.126.160.000	5.321.221.300
			Pembinaan Keamanan Daerah			475.366.300	819.834.500	505.593.200	470.233.200	546.173.200	662.853.200	3.480.053.600
			Pembinaan Ormas dan Lembaga Penyelenggara Pemilu			112.255.250	93.429.800	93.429.800	93.429.800	93.429.800	93.429.800	579.404.250
			Pengembangan Wawasan Kebangsaan			12.118.000	17.261.000	17.261.000	17.261.000	17.261.000	17.261.000	98.423.000
			Pembinaan Partai Politik			345.302.500	352.616.000	352.616.000	352.616.000	352.616.000	352.616.000	2.108.382.500
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			96,270,000	89,660,000	70,070,000	67,510,000	73,010,000	87,950,000	388.199.700
			Program Peningkatan Sarana dan prasarana perkantoran			310,660,000	-	-	-	-	-	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Kinerja			21,840,000	9,670,000	7,310,000	7,040,000	7,610,000	9,170,000	40.804.400
			Program Peningkatan kapasitas SDM SKPD			-	-	-	-	-	-	
			Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD			-	156,260,000	118,530,000	114,200,000	123,490,000	148,780,000	931.209.588

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan indikator kinerja SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan indikator kinerja program yang bersifat hasil (outcomes) merupakan target kinerja yang direncanakan yang dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					
				Transisi	I	II	III	IV	V
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Capaian penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial	persen	100	70	78,94	80	82,14	86,67	87,5

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran RPJM Daerah Tahun 2017-2022.

Sasaran strategis Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kesbangpol sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana strategis ini sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 2017-2017 dan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik.

